



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. RUDI BARMARA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 102616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.232.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/95 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/93 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
3. Tanah Seluas 7637 m2 di KOTA TASIKMALAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 382.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	136.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS TRD SPORTIVO 1500CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 W A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.140.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	46.296.368
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.417.436.368
III. HUTANG	Rp.	1.750.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.415.686.368

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.